



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA. Milono No.09 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
Telp. (0536) 3221853 Email: ptpalangka@gmail.com.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja *Instansi Pemerintah (LKjIP)* Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja dalam upaya mencapai visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung” .

Proses penyusunan laporan kinerja ini berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2015-2019. Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam renstra yang diterjemahkan dalam sebuah dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2019 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 11 (sebelas) indikator kinerja.

Secara umum capaian kinerja tahun 2019 telah sesuai dengan perjanjian kinerja, capaian sasaran strategis 1, yaitu “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akurat” sebesar 104%, dan capaian sasaran strategis 2 yaitu “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” sebesar 103,6%.

Semoga laporan ini memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan Semoga dengan adanya laporan ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya juga Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 21 Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



Mochamad Hatta



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Tahun 2019 adalah tahun terakhir (kelima) dari pelaksanaan renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015-2019. Secara umum capaian kinerja tahun 2019 telah sesuai dengan perjanjian kinerja, capaian sasaran strategis 1, yaitu “Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akutabel” sebesar 104%, dan capaian sasaran strategis 2 yaitu “Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara” sebesar 103,6%. Berikut rincian capaian indikator kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2019.

SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100	100	100
2	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100	100	100
3	Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100	100	100
4	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	90	95,5	106,1
5	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	91,8	102
6	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	90	100	111
7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85	94,1	110,7
8	Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi	90	92	102,2,
RATA RATA CAPAIAN SEBESAR 104 %				

SASARAN STRATEGIS 2 PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100
2	Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100	100	100
3	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	90	100	111
RATA RATA CAPAIAN SEBESAR 103,6 %				



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
3. Aspek Strategis Organisasi	5
4. Sistematika LKjIP Tahun 2019.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
1. Rencana Strategis 2015-2019	9
2. Indikator Kerja Utama	11
3. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	16
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
1. Capaian Kinerja Organisasi	19
2. Evaluasi Dan Analisa Capaian.....	20
3. Realisasi Anggaran	31
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	37
1. Kesimpulan	37
2. Saran	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya	2
Tabel 2. 1 Reviu IKU Tahun 2015-2019.....	12
Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2019 PT Palangka Raya	16
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PT Palangka Raya.....	17
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
Tabel 3. 2 Penyelesaian Sisa Perkara	21
Tabel 3. 3 Capaian Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3.....	21
Tabel 3. 4 Capaian Sasaran 1 Indikator 4, 5 dan 6.....	22
Tabel 3. 5 Realisasi Penyelesaian Perkara tepat waktu tahun 2015-2019	24
Tabel 3. 6 Capaian Sasaran 1 Indikator 7	25
Tabel 3. 7 Realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	26
Tabel 3. 8 Capaian Sasaran 1 Indikator 8	27
Tabel 3. 9 Realisasi Index Kepuasan Responden.....	28
Tabel 3. 10 Capaian Sasaran 2 Indikator 1 dan 2.....	30
Tabel 3. 11 Capaian Sasaran 2 Indikator 3	30
Tabel 3. 12 Perbandingan Anggaran Tahun 2015 s/d 2019	32
Tabel 3. 13 Perbandingan PAGU dan Realisasi Belanja DIPA 01.....	33
Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03.....	33
Tabel 3. 15 Pendapatan PNBP dari TA. 2015 s/d TA. 2019.....	34
Tabel 3. 16 Pendapatan PNBP Fungsional TA. 2015 s/d TA. 2019	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT Palangka Raya.....	5
Gambar 2. 1 Alur Penetapan Sasaran Strategis	9
Gambar 2. 2 Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya	10
Gambar 2. 3 Misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya	10
Gambar 3. 1 Grafik Capaian Sasaran 1 Indikator 4,5 dan 6	23
Gambar 3. 2 Grafik Capaian Sasaran 1 Indikator 2.....	23
Gambar 3. 3 Grafik Sasaran 1 Indikator 7	26
Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Besaran Pagu 2015 s/d 2019.....	32
Gambar 3. 5 Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2015 s/d 2019	32



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Palangka Raya periode 2015-2019 (Reviu V). Kebijakan, program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Tahun 2019 merupakan tahun ke lima penjabaran Renstra Pengadilan Tinggi Palangka Raya periode 2015-2019.

Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugasnya sebagai salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan fungsinya, yaitu mengadili, pembinaan, pengawasan, administratif dan fungsi lainnya, melalui serangkaian kegiatan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan. Berdasarkan tugas tersebut, Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan menjelaskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2019 merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah, baik di tingkat pusat dan daerah, harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.



2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

a. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terbentuk tanggal 29 Juli 1980 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Palangka Raya berkedudukan di Palangka Raya. Wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum semua pengadilan negeri dalam Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terletak pada Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya, beralamat di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221853, Faks. (0536) 3221854.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya terdiri atas 11 pengadilan negeri yang meliputi Wilayah Kota dan 10 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari:

Tabel 1. 1 Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya

No.	Nama	Wilayah Hukum
1	2	3
1	Pengadilan Negeri Palangka Raya	Kota Palangka Raya
2	Pengadilan Negeri Sampit	Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan
3	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara
4	Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	Kabupaten Kuala Kapuas
5	Pengadilan Negeri Muara Teweh	Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya
6	Pengadilan Negeri Buntok	Kabupaten Barito Selatan
7	Pengadilan Negeri Tamiang Layang	Kabupaten Barito Timur
8	Pengadilan Negeri Kasongan	Kabupaten Katingan
9	Pengadilan Negeri Kuala Kurun	Kabupaten Gunung Mas
10	Pengadilan Negeri Nanga Bulik	Kabupaten Lamandau
11	Pengadilan Negeri Pulang Pisau	Kabupaten Pulang Pisau



b. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai tugas secara tidak langsung atau vertikal membantu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, serta pembinaan administrasi pengadilan tingkat pertama di wilayahnya, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan pranata dan tata laksana perkara di tingkat banding.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.



3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (*vide*: UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

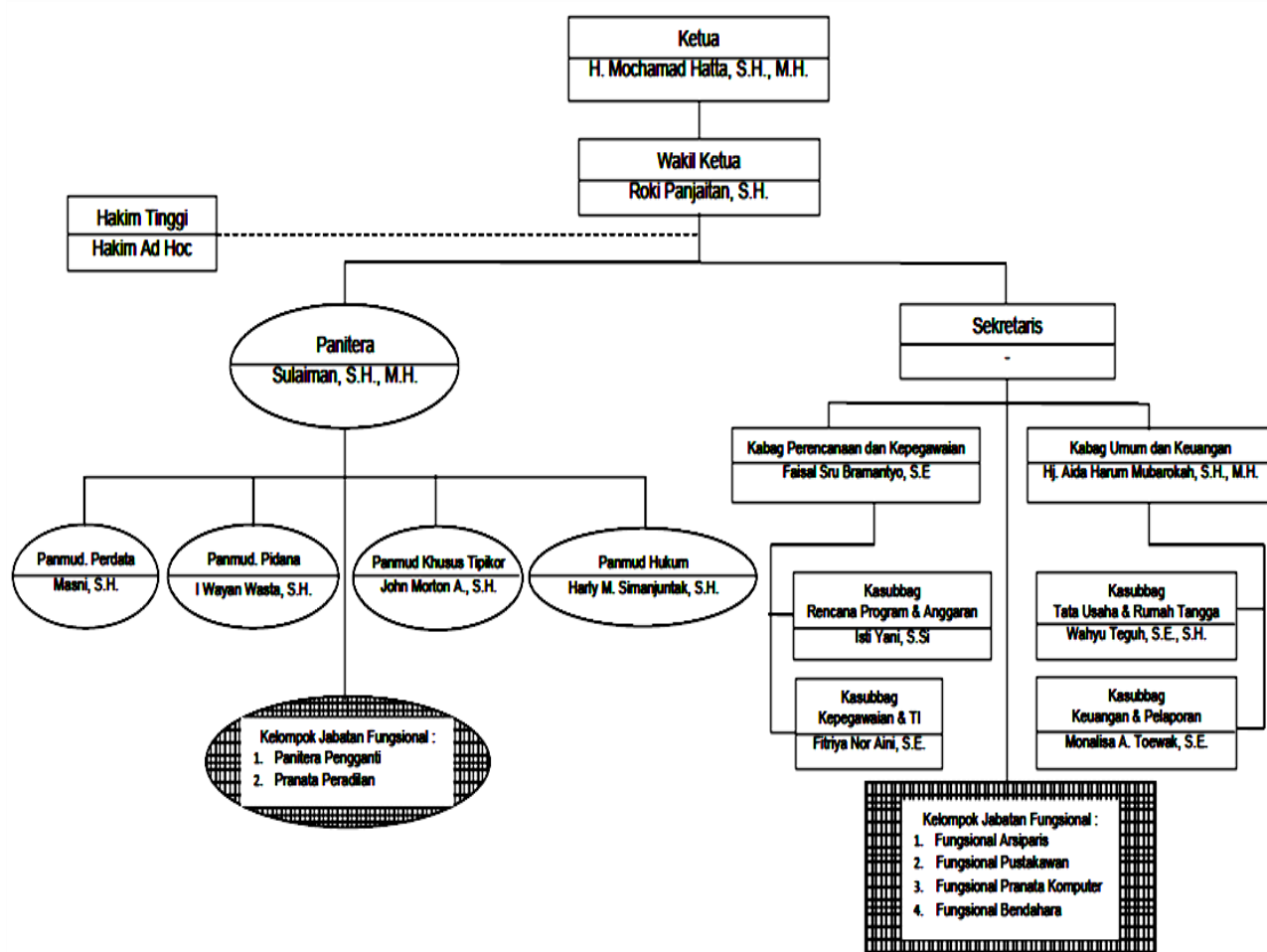
4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (*vide*: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan uraian tugas pokok dan fungsi PT Palangka Raya mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi PT Palangka Raya

3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan LKjIP ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan (*Voorj Post*) Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SK Nomor 01-144/KMA/SK/II/2011 serta SEMA Nomor 06 Tahun 2010. Dalam hal keterbukaan



informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya Undang-Undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang ini secara garis besar memuat ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun



penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya Undang-Undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparatur pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya.

4. Sistematika *LKjIP Tahun 2019*

LKjIP ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama tahun 2019 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LKjIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



KATA PENGANTAR

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan Reviu V Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Reviu V Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019, Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2019, dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2019, uraian analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan uraian dari analisis akuntabilitas anggaran tentang pencapaian sasaran-sasaran keuangan yang telah terealisasi

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2019, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

Lampiran

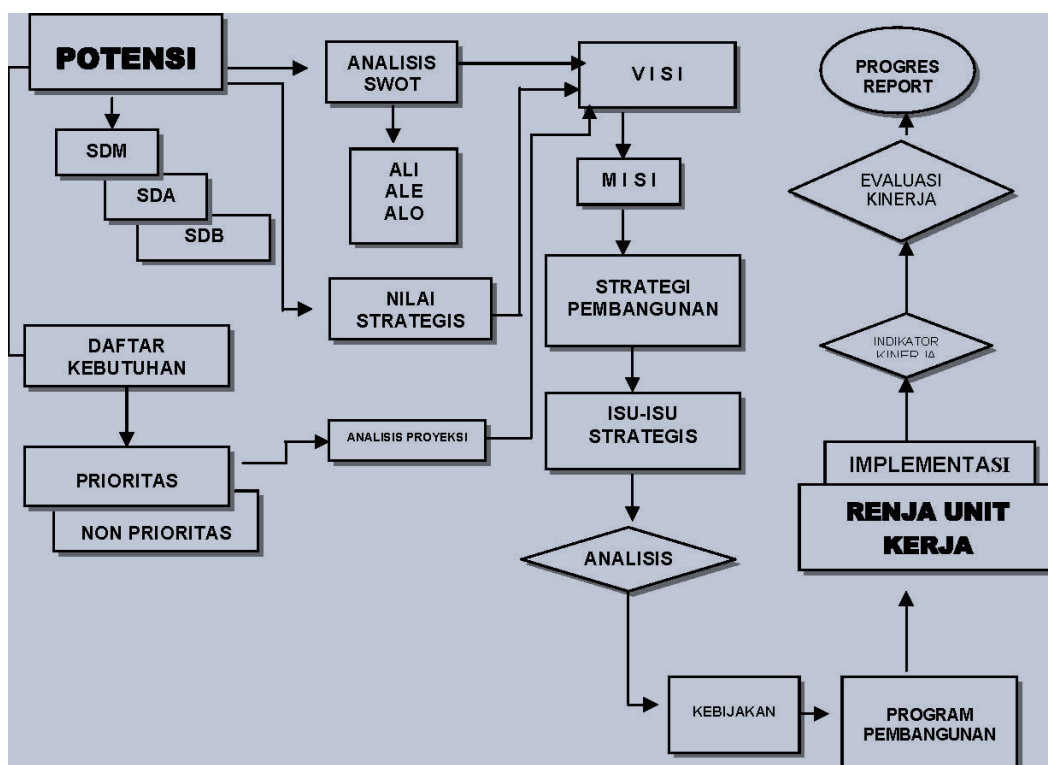


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2015-2019

Rencana Strategis 2015-2019 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi *progres report* tahunan dan lima tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Gambar 2. 1 Alur Penetapan Sasaran Strategis

Keterangan :

- SDA : Sumberdaya Alam;
- SDM : Sumberdaya Manusia;
- SDB : Sumberdaya Buatan;
- ALI : Analisis Lingkungan Internal;
- ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.
- ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.



Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi dan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya merumuskan visinya, sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Perumusan visi ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah yang tepat dan fokus bagi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mencapai keberhasilan organisasi. Perumusan visi juga merupakan wujud komitmen Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan kepada *stakeholders* Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- 1 Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2 Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3 Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4 Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Gambar 2. 3 Misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya



Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah menetapkan sasaran strategis 2015-2019 sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

2. Indikator Kerja Utama

Berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta memperhatikan hasil evaluasi penyelenggaraan program kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Selanjutnya hasil reviu tersebut ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Nomor 189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Penetapan Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja serta melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja



Tabel 2.1 Reviu IKU Tahun 2015-2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Perdata tahun sebelumnya	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Pidana tahun sebelumnya	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Pidana Khusus tahun sebelumnya	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan: SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$ Catatan: SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{\text{Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di } \textit{upload} \text{ dalam website}}{\text{Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus}} \times 100\%$ Catatan: • <i>One day publish</i> adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus • Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i>	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



3. Rencana Kinerja Tahun 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 memuat target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini merupakan komitmen yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Mengacu pada Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan Reviu Indikator Kinerja Utama 2015-2019 pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya maka disusun Rencana Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Kinerja Tahun 2019 PT Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke V (2019)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	100 %
		2. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	100 %
		3. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.	100 %
		4. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		5. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85 %
		8. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	90 %
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus.	90 %



4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, serta menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Setelah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis 2015-2019 dan Indikator Kinerja Utama 2015-2019, serta mengacu pada Rencana Kinerja Tahun 2019 pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 PT Palangka Raya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke V (2019)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	100 %
		2. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	100 %
		3. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.	100 %
		4. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		5. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85 %
		8. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	90 %



2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus.	90 %

P R O G R A M		A N G G A R A N	
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp	18.342.201.000,00
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp	146.500.000,00
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp	167.169.000,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian yang diperjanjikan pada tahun 2019. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

1. *Capaian Kinerja Organisasi*

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat Kementerian PANRB tahun 2019 telah tercapai.

Dari 11 indikator untuk 2 sasaran, seluruhnya sebanyak 11 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu dengan capaian $\geq 100\%$ terhadap target yang ditetapkan.

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL				
No	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%
3	Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%
4	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	90%	95,5%	106,1%
5	Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90%	91,8%	102%
6	Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	90%	100%	111%
7	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	94,1%	110,7%
8	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	90%	92%	102,2%
SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA				
NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100%	100%
2	Persentase Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu	100%	100%	100%
3	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90%	100%	111%



2. Evaluasi Dan Analisa Capaian

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Merupakan sasaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan khususnya di Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Dari 8 indikator yang diukur pada sasaran ini, 8 indikator memperoleh capaian $\geq 100\%$, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan : 100 %
2. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan : 100 %
3. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan : 100 %
4. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu : 102 %
5. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu : 106.1 %
6. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu : 111 %
7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : 110.7
8. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Tinggi : 102.2 %

✓ Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3

Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator kinerja “Persentase sisa perkara yang diselesaikan” adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2019 realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan, baik perkara perdata, pidana, maupun pidana khusus, dapat mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 8 perkara perdata, 14 perkara pidana, dan 0 perkara pidana khusus, seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2019.

Tabel dibawah menunjukkan realisasi penyelesaian sisa perkara sejak tahun 2016-2019. Tabel tersebut menunjukkan **setiap tahunnya Pengadilan**



Tinggi Palangka Raya selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun berikutnya lagi.

Tabel 3. 2 Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Perkara	Sisa Perkara Yang harus diselesaikan	Sisa Perkara yang diselesaikan	Realisasi
Th. 2019	1. Perdata	6	6	100%
	2. Pidana	4	4	100%
	3. Pidana Khusus	-	-	100%
	Jumlah			
Th. 2018	1. Perdata	8	8	100%
	2. Pidana	14	14	100%
	3. Pidana Khusus	-	-	100%
	Jumlah			
Th. 2017	1. Perdata	18	18	100%
	2. Pidana	8	8	100%
	3. Pidana Khusus	7	7	100%
	Jumlah			
Th. 2016	1. Perdata	13	13	100%
	2. Pidana	6	6	100%
	3. Pidana Khusus	4	4	100%
	Jumlah			
Th. 2015	1. Perdata	15	15	100%
	2. Pidana	3	3	100%
	3. Pidana Khusus	2	2	100%
	Jumlah			

Tabel 3. 3 Capaian Sasaran 1 Indikator 1, 2 dan 3

Tahun	Perkara	Target dan *Realisasi	Capaian
Th.2019	1.Perdata	Target	100%
		Realisasi	100%
	2.Pidana	Target	100%
		Realisasi	100%
	3.Pidana Khusus	Target	100%
		Realisasi	100%
	Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1, 2 dan 3 Th. 2019		
Th.2018	1.Perdata	Target	90%
		Realisasi	100%
	2.Pidana	Target	90%
		Realisasi	100%
	3.Pidana Khusus	Target	90%
		Realisasi	100%
	Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1, 2 dan 3 Th. 2018		
Th. 2017	1.Perdata	Target	90%
		Realisasi	100%
	2.Pidana	Target	90%
		Realisasi	100%
	3.Pidana Khusus	Target	90%
		Realisasi	100%
	Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1, 2 dan 3 Th. 2017		
Th. 2016	1.Perdata	Target	100%
		Realisasi	100%
	2.Pidana	Target	100%
		Realisasi	100%
	3.Pidana Khusus	Target	100%
		Realisasi	100%
	Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1, 2 dan 3 Th. 2016		
Th. 2015	1.Perdata	Target	100%
		Realisasi	100%
	2.Pidana	Target	100%
		Realisasi	100%
	3.Pidana Khusus	Target	100%
		Realisasi	100%
	Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 1, 2 dan 3 Th. 2016		

✓ Sasaran 1 Indikator 4, 5 dan 6

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tahun berjalan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

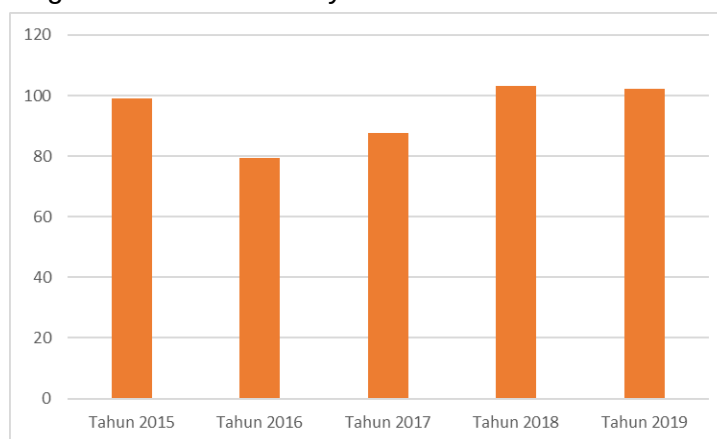
Pada tahun 2019 indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu memiliki rata-rata capaian sebesar 107,1% perkara perdata, 102,3%, perkara pidana, 102,7% perkara Pidana Khusus 97,2%. Secara umum capaian indikator ini baik karena beberapa perkara capaiannya telah melebihi target, namun realisasi dan capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu untuk ketiga perkara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3. 4 Capaian Sasaran 1 Indikator 4, 5 dan 6

Tahun	Perkara		Target dan *Realisasi		Capaian
Th.2019	4.Perdata	Target		90%	102,7%
		Realisasi		92,5%	
	5.Pidana	Target		90%	107,1%
		Realisasi		96,4%	
	6.Pidana Khusus	Target		90%	97,2%
Realisasi			87,5%		
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 4, 5 dan 6 Th. 2019					102,3%
Th.2018	4.Perdata	Target		90%	101,4%
		Realisasi		91,3%	
	5.Pidana	Target		90%	97,3%
		Realisasi		87,6%	
	6.Pidana Khusus	Target		90%	111,1%
Realisasi			100%		
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 4,5 dan 6 Th. 2018					103,2%
Th. 2017	4.Perdata	Target		90%	92,7%
		Realisasi		83,5%	
	5.Pidana	Target		90%	89,4%
		Realisasi		80,5%	
	6.Pidana Khusus	Target		90%	80,4%
Realisasi			72,4%		
Rata-rata capaian Sasaran I – Indikator 4, 5 dan 6 Th. 2017					87,5%
Th. 2016	4.Perdata	Target		100%	81,8%
		Realisasi		81,8%	
	5.Pidana	Target		100%	91,3%
		Realisasi		91,3%	
	6.Pidana Khusus	Target		100%	65%
Realisasi			65%		
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 4, 5 dan 6 Th. 2016					79,3%
Th. 2015	4.Perdata	Target		80%	110%
		Realisasi		88,3%	
	5.Pidana	Target		80%	114%
		Realisasi		91,5%	
	6.Pidana Khusus	Target		80%	75%
Realisasi			60%		
Rata-rata capaian Sasaran I - Indikator 4, 5 dan 6 Th. 2015					99%

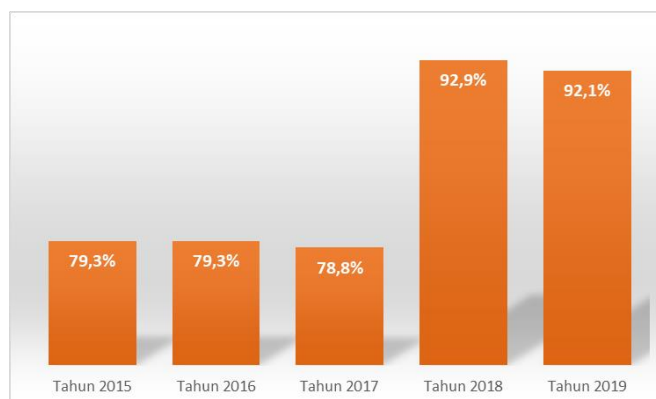


Rincian dan capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah. Secara umum, rata-rata capaian persentase penyelesaian perkara (perdata, pidana, pidana khusus) sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berturut-turut adalah 99 % ; 79,3% ; 87,5% ; 103,2% ; 102,3%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan capaian penyelesaian perkara pada tahun 2019, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan capaian tersebut disebabkan karena adanya penurunan jumlah perkara pada tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 3. 1 Grafik Capaian Sasaran 1 Indikator 4,5 dan 6

Walaupun capaian pada tahun 2019 menurun karena adanya penurunan jumlah perkara, namun secara umum realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Grafik dibawah menunjukkan peningkatan/penurunan realisasi tahun 2019 sebesar 92,1% dibandingkan tahun 2018 sebesar 92,9%.



Gambar 3. 2 Grafik Capaian Sasaran 1 Indikator 2

Pada tahun 2019 penyelesaian perkara pidana 96,4%, perdata 92,5% dan PIDANA KHUSUS 87,5%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2018 sebesar

pidana 87,6%, perdata 91,3% dan PIDANA KHUSUS 100% , sesuai data pada tabel dibawah.

Tabel 3. 5 Realisasi Penyelesaian Perkara tepat waktu tahun 2015-2019

Th. 2019	Sisa Th. 2018	Masuk	Jumlah perkara yang ada	Putus	Sisa Th. 2019	Realisasi
Perdata	8	73	81	75	6	92,5%
Pidana	14	98	112	108	4	96,4%
Pidana Khusus	0	8	8	7	1	87,5%
Jumlah	22	179	201	190	11	92,1%
Th. 2018	Sisa Th. 2017	Masuk	Jumlah perkara yang ada	Putus	Sisa Th. 2018	Realisasi
Perdata	15	77	92	84	8	91,3%
Pidana	22	91	113	99	14	87,6%
Pidana Khusus	8	8	16	16	0	100%
Jumlah	45	176	221	199	22	92,9%
Th. 2017	Sisa Th. 2016	Masuk	Jumlah perkara yang ada	Putus	Sisa Th. 2017	Realisasi
Perdata	18	73	91	76	15	83,5%
Pidana	8	105	113	91	22	80,5%
Pidana Khusus	7	22	29	21	8	72,4
Jumlah	33	200	233	188	45	78,8%
Th. 2016	Sisa Th. 2015	Masuk	Jumlah perkara yang ada	Putus	Sisa Th. 2016	Realisasi
Perdata	13	86	99	81	18	81,8%
Pidana	6	87	93	85	8	91,3%
Pidana Khusus	4	16	20	13	7	65%
Jumlah	23	189	212	179	33	79,3%
Th. 2015	Sisa Th. 2014	Masuk	Jumlah perkara yang ada	Putus	Sisa Th. 2015	Realisasi
Perdata	15	96	111	98	13	88,3 %
Pidana	3	68	71	65	6	91,5%
Pidana Khusus	2	8	10	6	4	60%
Jumlah	23	189	212	179	33	79,3%

Untuk meningkatkan indikator persentase penyelesaian perkara yang tepat waktu, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berupaya menerapkan berbagai kebijakan antara lain:

- Batas waktu penyelesaian perkara sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai jangka waktu, agar memasukkan data perkara dalam dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tepat waktu, yaitu one day publish (satu hari setelah putus).

- c. Melakukan reviu SOP penyelesaian perkara baik Pidana, Perdata, dan Pidana Khusus.
- d. Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap penyelesaian perkara melalui rapat bulanan.

✓ **Sasaran 1 Indikator 7**

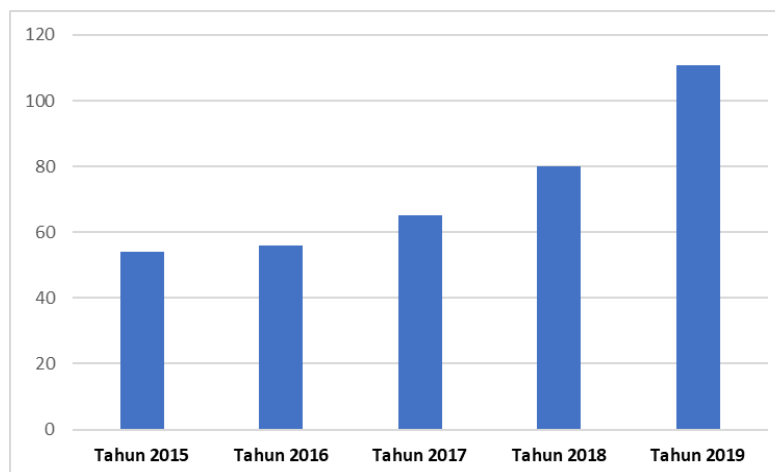
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi

Indikator kinerja “Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, dengan jumlah putusan perkara. Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Pada tahun 2019, capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah 110,7%. Sesuai data pada tabel dibawah, capaian indikator perkara yang tidak mengajukan kasasi pada tahun 2019 secara umum cukup baik karena memperoleh capaian $\geq 85\%$ dari target. Rata-rata capaian pada indikator ini cenderung meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 80% (tahun 2018), 65% (tahun 2017) dan 56% (tahun 2016), sesuai pada grafik dibawah. Kenaikan tersebut dikarenakan pada tahun 2019 adanya peningkatan realisasi dan capaian dibandingkan tahun 2018.

Tabel 3. 6 Capaian Sasaran 1 Indikator 7

Tahun	Indikator	Target dan Realisasi	Capaian
Tahun 2019	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target	85%
		Realisasi	94,1%
Tahun 2018	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target	85%
		Realisasi	68%
Tahun 2017	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target	85%
		Realisasi	55,6%
Tahun 2016	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target	85%
		Realisasi	47,6%
Tahun 2015	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	Target	85%
		Realisasi	46%



Gambar 3. 3 Grafik Sasaran 1 Indikator 7

Walaupun jumlah putusan tingkat banding pada tahun 2019 lebih sedikit dibanding tahun 2018 capaian persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018, sehingga disimpulkan secara umum realisasi indikator ini meningkat dibandingkan tahun 2018.

Tahun 2019, realisasi pencari keadilan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dapat dilihat pada tabel di bawah. Realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi sebesar 94,1 % (dengan kata lain pencari keadilan yang mengajukan kasasi sebanyak 5,9%). Dibandingkan tahun 2018 persentase pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mengalami penurunan. Pada data tahun 2018, perkara yang tidak mengajukan kasasi 68% (sebanyak 32% pencari keadilan yang mengajukan kasasi).

Tabel 3. 7 Realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi

Tahun	Putus Tk. Banding	Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi	Realisasi yang tidak Mengajukan Kasasi
Th. 2019	188	11	177	110,7%
Th. 2018	200	64	136	80%
Th. 2017	187	93	104	65%
Th. 2016	191	100	91	56%
Th. 2015	169	92	77	54%

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, masyarakat pencari keadilan yang melakukan upaya hukum kasasi semakin menurun dibandingkan tahun 2018. Dengan kata lain semakin



menurunnya yang mengajukan upaya hukum, disebabkan karena masyarakat semakin puas atas putusan banding pengadilan.

Namun faktor yang menyebabkan masyarakat para pencari keadilan dan pengguna pengadilan sehingga tidak melakukan upaya hukum kasasi, disebabkan karena masyarakat semakin puas atas putusan banding pengadilan. Disamping pelayanan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya semakin baik dan transparan juga didukung oleh keterbukaan informasi serta cepatnya pelayanan di pengadilan.

✓ **Sasaran 1 Indikator 8**
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi diukur mengacu pada Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi pada tahun 2019 memperoleh capaian sebesar 102,2%, capaian ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 117,1%. Namun realisasinya setiap tahun kurang lebih sama yaitu : 117,1 (Th. 2018) ; 115,1 (Th. 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara konsisten telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Tabel 3. 8 Capaian Sasaran 1 Indikator 8

Tahun	Target dan Realisasi			Capaian
Th. 2019	Target		90%	102,2%
	Realisasi		92%	
Th. 2018	Target		70%	117,1%
	Realisasi		82,01%	
Th. 2017	Target		65%	115,1%
	Realisasi		74,83%	



Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2019 terdiri dari 9 komponen, sebagai berikut : 1. Persyaratan ; 2. Prosedur ; 3. Waktu pelayanan; 4. Biaya/ Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Maklumat Pelayanan; 9. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pada tahun 2018, hasil survey kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan dari 9 ruang lingkup yang disurvei, realisasi penilaian tertinggi pada ruang lingkup kompetensi pelaksana, dan perilaku pelaksana dengan nilai sebesar 3,45, sedangkan nilai terendah pada ruang lingkup waktu pelayanan, dengan nilai 3,059.

Realisasi indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi pada Th. 2017, 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 3. 9 Realisasi Index Kepuasan Responden

Tahun	No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Realisasi	Target	Capaian
2019	1.	Persyaratan	3.192	Baik	92%	90%	102,2%
	2.	Prosedur	3.291	Sangat Baik			
	3.	Waktu Pelayanan	3.059	Baik			
	4.	Biaya/Tarif	3.300	Sangat Baik			
	5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.281	Sangat Baik			
	6.	Kompetensi Pelaksana	3.458	Sangat Baik			
	7.	Perilaku Pelaksana	3.453	Sangat Baik			
	8.	Maklumat Pelayanan	3.187	Baik			
	9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.300	Sangat Baik			
Tahun	No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Realisasi	Target	Capaian
2018	1.	Persyaratan	3.192	Baik	82,01%	70%	117,1%
	2.	Prosedur	3.291	Sangat Baik			
	3.	Waktu Pelayanan	3.059	Baik			
	4.	Biaya/Tarif	3.300	Sangat Baik			
	5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.281	Sangat Baik			
	6.	Kompetensi Pelaksana	3.458	Sangat Baik			
	7.	Perilaku Pelaksana	3.453	Sangat Baik			
	8.	Maklumat Pelayanan	3.187	Baik			
	9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.300	Sangat Baik			
Tahun	No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Realisasi	Target	Capaian
2017	1.	Persyaratan	3.192	Baik	74,83%	65%	115,1%
	2.	Prosedur	3.291	Sangat Baik			
	3.	Waktu Pelayanan	3.059	Baik			
	4.	Biaya/Tarif	3.300	Sangat Baik			



5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.281	Sangat Baik			
6.	Kompetensi Pelaksana	3.458	Sangat Baik			
7.	Perilaku Pelaksana	3.453	Sangat Baik			
8.	Maklumat Pelayanan	3.187	Baik			
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.300	Sangat Baik			

Sasaran 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara. Indikator- indikator pada sasaran ini berhasil memperoleh capaian $\geq 100\%$,indikator tersebut antara lain :

1. Persentase Salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu: 100%
2. Persentase Salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat Waktu: 100%
3. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus : 111 %

✓ Sasaran 2 Indikator 1 dan 2 **Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

Indikator kinerja “Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju dengan jumlah putusan. Tahun 2019 indikator ini mencapai target 100%, karena seluruh salinan putusan dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, Salinan Putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan

Capaian indikator ini selalu mencapai 100% seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah putusan perkara pidana, pidana khusus, dan perdata sebanyak 190 perkara, dan seluruh salinan putusan tersebut dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu


Tabel 3. 10 Capaian Sasaran 2 Indikator 1 dan 2

Indikator	Tahun	Target dan Realisasi			Capaian
		Target	Realisasi		
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Th. 2019	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	
	Th. 2018	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	
	Th. 2017	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	
	Th. 2016	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	
	Th. 2015	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	

Pada umumnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya langsung mengirim petikan putusan melalui email ke pengadilan pengaju setelah perkara diputus, dan salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju paling lama 2 (dua) hari, dengan demikian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektivitas Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam pengiriman putusan perkara.

Indikator ini diukur dengan pencatatan yang valid dari tanda terima pengiriman berkas melalui pihak pengirim (Pos Indonesia). Kondisi pengiriman salinan putusan ke Pengadilan tepat waktu telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya

✓ **Sasaran 2 Indikator 3**
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

Indikator kinerja “Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus” adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus.

Tabel 3. 11 Capaian Sasaran 2 Indikator 3

Indikator	Tahun	Target dan Realisasi			Capaian
		Target	Realisasi		
Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Th. 2019	Target		100%	100%
		Realisasi		100 %	
	Th. 2018	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	
	Th. 2017	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	
	Th. 2016	Target		100%	100%
		Realisasi		100%	



Pada tahun 2019 capaian indikator ini mencapai target 100%. Dari jumlah perkara yang diputus 188 perkara, terdapat 7 Perkara yang menarik perhatian masyarakat yaitu perkara pidana khusus tindak pidana korupsi dan perkara tersebut putusannya telah diupload dalam website dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Capaian ini diperoleh karena Pengadilan Tinggi Palangka Raya selalu menerapkan one day publish sesuai dengan SOP, yaitu mengupload putusan ke web setelah 1 hari diputus. Perkara yang telah diputus diupload di website melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding Mahkamah Agung RI atau Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Kondisi ini juga telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya terus berupaya meningkatkan pelayanan publik.

3. Realisasi Anggaran

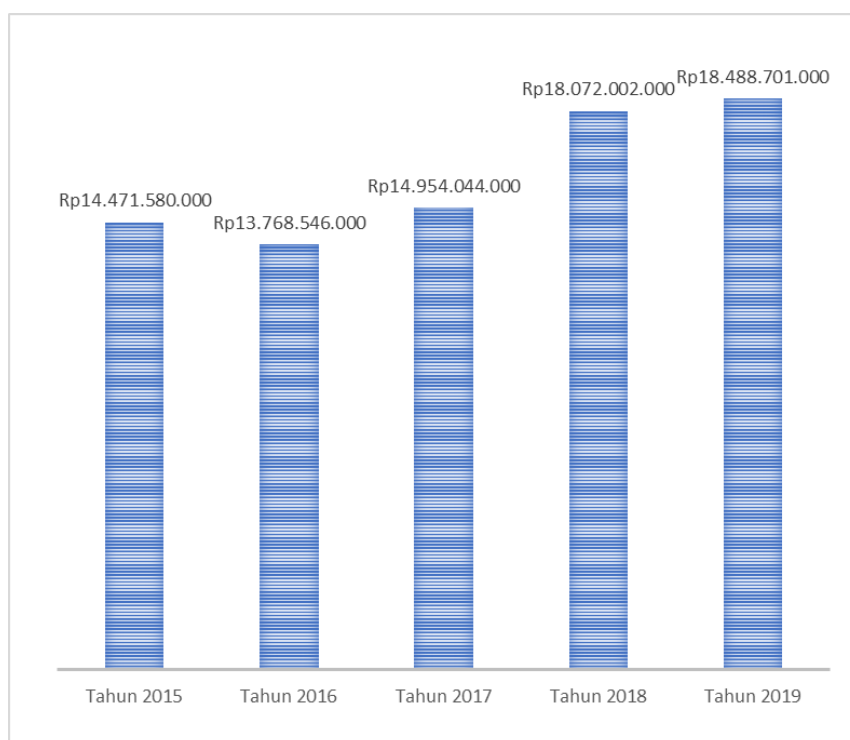
1. DIPA 01 (BUA)

Pengadilan Tinggi Palangka Raya memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum). Pada Tahun 2019 DIPA 01 BUA (Badan Urusan Administrasi) PAGU sebesar Rp 18.488.701.000 dan DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) PAGU sebesar Rp. 167.169.000. Pada Tahun ini DIPA 01 BUA melakukan revisi sebanyak 14 (empat Belas) kali akibat adanya penambahan Belanja Barang yaitu Sewa Rumdin Hakim, pembayaran sewa Fotocopy, adanya penambahan Belanja Modal BA.BUN, perubahan pejabat pelaksana anggaran serta penyelesaian Pagu Minus untuk Belanja Pegawai (Akun 51), sementara untuk DIPA 03 BADILUM (Badan Peradilan Umum) melakukan revisi anggaran sebanyak 4 (empat) kali karena adanya perubahan nama pejabat pelaksana anggaran dan pergeseran pok. Anggaran Belanja terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai (Akun 51), Belanja Barang (Akun 52) dan Belanja Modal (Akun 53).

Tahun 2019 anggaran paling besar adalah Belanja Pegawai yaitu sebesar **Rp. 15.928.107.000** atau sekitar **85.38%** dari jumlah pagu anggaran yang ada, kemudian disusul oleh Belanja Barang sebesar **Rp. 2.581.263.000** atau sekitar **13.84 %** dari jumlah pagu anggaran dan Belanja Modal **Rp. 146.500.000**.


Tabel 3. 12 Perbandingan Anggaran Tahun 2015 s/d 2019

PAGU BELANJA	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
Belanja Pegawai	12.154.765.000	11.189.005.000	12.564.072.000	14.737.354.000	15.928.107.000
Belanja Barang	1.571.815.000	1.835.541.000	2.005.472.000	1.951.648.000	2.414.094.000
Belanja Modal	745.000.000	744.000.000	384.500.000	1.383.000.000	146.500.000
Jumlah	14.471.580.000	13.768.546.000	14.954.044.000	18.072.002.000	18.488.701.000


Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Besaran Pagu 2015 s/d 2019

Gambar 3. 5 Grafik Perbandingan Anggaran Tahun 2015 s/d 2019


Tabel 3. 13 Perbandingan PAGU dan Realisasi Belanja DIPA 01

TAHUN 2015		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	12.154.765.000	12.146.622.498
Belanja Barang	1.571.815.000	1.425.890.825
Belanja Modal	745.000.000	714.863.000
Jumlah	14.471.580.000	14.287.376.323
TAHUN 2016		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	11.189.005.000	11.010.067.949
Belanja Barang	1.835.541.000	1.648.361.054
Belanja Modal	744.000.000	743.926.000
Jumlah	13.768.546.000	13.458.291.003
TAHUN 2017		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	12.564.072.000	12.525.979.014
Belanja Barang	2.005.472.000	1.557.663.240
Belanja Modal	384.500.000	339.150.000
Jumlah	14.954.044.000	14.698.490.937
TAHUN 2018		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	14.737.354.000	14.737.066.475
Belanja Barang	1.951.648.000	1.519.137.263
Belanja Modal	1.383.000.000	1.374.676.620
Jumlah	18.072.002.000	17.883.039.277
TAHUN 2019		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	15.928.107.000	15.861.261.830
Belanja Barang	2.414.094.000	2.314.127.398
Belanja Modal	146.500.000	144.666.500
Jumlah	18.488.701.000	18.320.055.728

2. DIPA 03 (DIRJEN BADILUM)

Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk DIPA 03 (Dirjen Badilum) mendapatkan anggaran sebesar Rp. 167.169.000 dengan realisasi sebesar Rp.163.098.576 atau 97,57% dari pagu anggaran. DIPA 03 (Dirjen Badilum) hanya terdiri dari belanja barang saja. Belanja Barang terdiri dari :

- Belanja Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos.
- Belanja Bahan
- Belanja Barang Persediaan
- Belanja Perjalanan dinas

Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Belanja Barang DIPA 03

TAHUN 2015		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Barang	177.375.000	160.829.150
Jumlah	177.375.000	160.829.150
TAHUN 2016		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Barang	43.500.000	41.523.549
Jumlah	43.500.000	41.523.549
TAHUN 2017		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Barang	75.672.000	71.946.300
Jumlah	75.672.000	71.946.300
TAHUN 2018		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Barang	140.388.000	136.996.700
Jumlah	140.388.000	136.996.700
TAHUN 2019		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Belanja Barang	316.220.000	316.220.000
Jumlah	316.220.000	316.220.000



Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pada Tahun 2019 pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diterima dan disetorkan Pengadilan Tinggi Palangkaraya ke kas Negara sebesar Rp.54.286.372 yang terdiri atas pendapatan PNBP umum (Dipa 01) sebesar Rp.53.261.372 dan PNBP Fungsional (Dipa 03) sebesar Rp.1.025.000.

Pendapatan PNBP Umum 01 (Badan Urusan Administrasi)

PNBP umum Realisasi sebesar Rp. 53.261.372 terdiri dari pendapatan dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) dengan realisasi sebesar Rp. 41.398.372 merupakan pendapatan dari sewa rumah dinas realisasi sebesar Rp. 28.576.372 dan pemanfaatan aset tanah untuk ATM (Pengadilan Tinggi Palangka Raya) dengan realisasi Rp. 12.822.000 dan Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) realisasi sebesar Rp. 11.863.000

Tabel 3. 15 Pendapatan PNBP dari TA. 2015 s/d TA. 2019

TAHUN 2015		
PNBP	TARGET	REALISASI
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		31.455.293
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		13.033.550
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		381
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		3.250.008
Jumlah		47.739.232
TAHUN 2016		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	28.977.213	41.523.549
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		41.523.549
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti	33.171.011	



Rugi Non Bendahara		
Jumlah	62.148.224	
TAHUN 2017		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		38.166.927
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		
Jumlah		38.166.927
TAHUN 2018		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.673.000	28.952.530
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		28.904.943
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		294
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		
Jumlah	30.673.000	57.857.767
TAHUN 2019		
ANGGARAN	PAGU	REALISASI
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30.673.000	41.398.372
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		11.863.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara		
Jumlah	30.673.000	53.261.372



Pendapatan PNBP FUNGSIONAL 03 (DIRJEN BADILUM)

PNBP fungsional pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanya ada Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya (425239). Pendapatan PNBP ini telah melebihi target yang direncanakan dimana untuk PNBP fungsional target sebesar Rp. 575.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.025.000

Tabel 3. 16 Pendapatan PNBP Fungsional TA. 2015 s/d TA. 2019

TAHUN 2015		
PNBP	TARGET	REALISASI
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan		305,000
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya		490,000
Jumlah		795,000
PNBP		
PNBP	TARGET	REALISASI
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	-	80.000
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	677.400	415.000
Jumlah	677.400	495.000
TAHUN 2017		
PNBP	TARGET	REALISASI
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	-	195.000
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	677.400	380.000
Jumlah	677.400	575.000
TAHUN 2018		
PNBP	TARGET	REALISASI
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan		
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	495.000	705.000
Jumlah	495.000	705.000
TAHUN 2019		
PNBP	TARGET	REALISASI
Pendapatan Pengesahan Surat Dibawah Tangan	-	-
Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan Lainnya	575.000	1.025.000
Jumlah	575.000	1.025.000



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama kurun waktu tahun 2019 yang dituangkan menjadi 2 (dua) target sasaran, yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Lembaga peradilan, karena pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) selama tahun 2019 dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2015- 2019.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2019 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata, baik dari Kepaniteraan maupun Kesekretariatan, dengan mengevaluasi SOP yang sedang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas kinerja Lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai institusi yang berada dibawah Mahkamah Agung yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.

Dengan diterbitkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2019, diharapkan bisa terlihat Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja Lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun yang akan datang.



2. Saran

- a) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai *instrument control* yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan badan peradilan.
- b) LKjIP, sebagai akhir dari SAKIP, dapat dioptimalisasi pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami, guna peningkatan kinerja tahun berikutnya.
- c) Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak.
- d) Dengan penggunaan anggaran yang *efisien* dan tepat sasaran, diharapkan tetap dapat meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
- e) Kelayakan LKjIP sebagai instrument *punishment and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (RENSTRA, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
- f) Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LKjIP.

Lampiran 1

Pengukuran Kinerja Triwulanan



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

LAPORAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2019

- Memperhatikan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , Bagian keenam Pasal 18 dan 19;
- Permenpan No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Rekomendasi Kementerian PAN dan RB No. B/3826/M.PAN-RB/11/2014 Hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah “Pemanfaatan Penetapan Kinerja (PK) yang telah ditandatangani, sebagai sarana untuk menilai dan menyimpulkan kinerja pihak yang berjanji. Selain itu , perlu ada penjabaran lebih lanjut dokumen Penetapan Kinerja (PK) ke dalam satu rencana aksi yang lebih detail dan dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan (progress) kinerja secara periodik (triwulan atau semesteran), sekaligus sebagai sarana untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan.



Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id
Email : pt_kalteng@yahoo.com

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan											
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)	Input	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Percentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	10	7 (70,00%)	70,00	1	1 (100,00%)	100,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00
Percentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan		100	16	14 (87,50%)	87,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	
Percentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan		100	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	
Percentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		90	10	10 (100,00%)	0,00	21	21 (100,00%)	0,00	21	21 (100,00 %)	0,00	15	15 (100,00 %)	0,00	
Percentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		90	7	7 (100,00%)	111,11	33	33 (100,00%)	111,11	18	18 (100,00 %)	111,11	36	36 (100,00 %)	111,11	
Percentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu		90	0	0 (0,00%)	0,00	4	4 (100,00%)	111,11	3	3 (100,00 %)	111,11	0	0 (0,00 %)	0,00	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00%)	0,00	0	0 (0,00 %)	0,00	188	177 (94,15 %)	110,59
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama dan Masyarakat yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	90	0	0 (0,00%)	0,00	190	173 (91,05%)	101,11	0	0 (0,00 %)	0,00	185	172 (92,97 %)	102,22
		Percentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100	17	17 (100,00%)	100,00	22	22 (100,00%)	100,00	21	21 (100,00 %)	100,00	15	15 (100,00 %)	100,00
		Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100	21	21 (100,00%)	100,00	33	33 (100,00%)	100,00	18	18 (100,00 %)	100,00	36	36 (100,00 %)	100,00
		Percentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	90	0	0 (0,00%)	0,00	4	4 (100,00%)	111,11	3	3 (100,00 %)	111,11	0	0 (0,00 %)	0,00



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

KEGIATAN DAN ANGGARAN

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp18.342.201.000,00	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp146.500.000,00	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 167.169.000,00	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)

Lampiran 2
Pernyataan Telah Direviu



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : palangkarayapt@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk tahun anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.



Palangka Raya, 21 Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

Mochamad Hatta
Mochamad Hatta

FORMULIR REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	✓ ✓ ✓

No	Pernyataan	Check List
	4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	✓
	5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
	6. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	✓
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	✓
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	✓
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	✓
	10. IKU dan IK telah SMART.	✓

Palangka Raya, 21 Februari 2020
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



Mochamad Hatta

Lampiran 3
Reviu Indikator Kinerja Utama
2015-2019



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya;
- b. bahwa Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 109/KPT/OT.01.1/SK/X/2017 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Palangka Raya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Mengingat...

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Memperhatikan : Hasil evaluasi penyelenggaraan program kerja terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 26 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA...

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 Agustus 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

MOCHAMAD HATTA

Tembusan:

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI.

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 189/KPT/OT.01.1/SK/VIII/2019

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan. c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan. d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Perdata tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Pidana tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara Pidana Khusus tahun sebelumnya $\frac{\text{Jumlah perkara Perdata yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Perdata yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Pidana yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan • Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum Kasasi • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Jumlah salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju $\times 100\%$ Jumlah putusan Catatan: - SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan pengaju $\times 100\%$ Jumlah putusan Catatan: - SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di <i>upload</i> dalam <i>website</i> $\times 100\%$ Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus Catatan: <i>One day publish</i> adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus - Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang <i>One Day Publish</i>	Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi Ketua Pengadilan Tinggi	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

MOCHAMAD HATTA

Lampiran 4
Matrik Reviu Rencana Strategis
2015-2019

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019

- Instansi : Pengadilan Tinggi Palangka Raya

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palangka Raya Yang Agung

Misi : 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran		Target					Strategi									
	Uraian	Indikator Tujuan		Uraian	Indikator Kinerja	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2019		Anggaran (Rp 000)				
														Jumlah	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan.	80	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan. b. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan. c. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan. d. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu. e. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu. f. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu. g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. h. Index Responden Pengadilan Negeri yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	90 90 90 80 80 80 85 65	90 90 90 85 85 85 85 65	90 90 90 90 90 90 85 70	100 100 100 90 90 90 85 90	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	162	Perkara	177,375	43.500	75.672	140.388	167.169	
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	80	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70 70 75	70 70 75	75 75 90	100 100 90	Program peningkatan manajemen peradilan umum	Peningkatan manajemen peradilan umum	Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding secara tepat waktu	162	Perkara	177,375	43.500	75.672	140.388	167.169	
										Program peningkatan manajemen peradilan umum	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan prasarana internal	1	Layanan	745,000	744.000	384.500	1.383.000	146.500	

Lampiran 5
Revisi Rencana Kinerja Tahun 2019

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun V (2019)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	100 %
		2. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	100 %
		3. Persentase sisa perkara Pidana Khusus yang diselesaikan.	100 %
		4. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		5. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85 %
		8. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	90 %
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	90 %

Palangka Raya, 26 Agustus 2019
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

Lampiran 6
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 26 Agustus 2019

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,



Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19590904 198403 1 004

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke V (2019)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara Perdata yang diselesaikan.	100 %
		2. Persentase sisa perkara Pidana yang diselesaikan.	100 %
		3. Persentase sisa perkara Pidana khusus yang diselesaikan.	100 %
		4. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		5. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang diselesaikan tepat waktu.	90 %
		7. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.	85 %
		8. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	90 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		2. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.	100 %
		3. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah diputus.	90 %

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp18.342.201.000,00	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp146.500.000,00	DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp167.169.000,00	DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum)



Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., M.H.
NIP. 19590904 198403 1 004



Palangka Raya, 26 Agustus 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
NIP. 19590511 198403 1 004

Lampiran 7
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Tahun 2019

RENCANA AKSI PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
a. Perencanaan Kinerja 1) Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) telah ada, namun belum memuat target jangka menengah. 2) Pada kualitas Renstra, tujuan dan sasaran telah berorientasi pada hasil, program/kegiatan telah digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program, Renstra telah menyajikan IKU, namun indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. 3) Dokumen Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMN/dokumen	a. Perencanaan Kinerja 1) Menyempurnakan dokumen Renstra dengan menetapkan Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahun, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah. 2) Target kinerja pada dokumen Renstra agar ditetapkan dengan baik, serta indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. 3) Menyempurnakan indikator kinerja sasaran dan kegiatan pada dokumen RKT sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, serta target	a. Perencanaan Kinerja 1) Membentuk Tim Penyusunan SAKIP yang salah satu tugasnya mengkaji dan menyempurnakan kembali Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, target tahun, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah. 2) Membentuk kelompok kerja satuan tugas SAKIP	Triwulan/Semester	Ketua Pengadilan Tinggi

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
Renstra atasannya, telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kinerja sesuai tugas dan fungsi pengadilan, namun target kinerja pada dokumen Renstra belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik. 4) Pada implementasi Renstra, dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, penyusunan dokumen Renstra unit kerja/satker dibawahnya, penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, serta dokumen Renstra telah direviu secara berkala. 5) Dokumen RKT telah menyajikan IKU, telah selaras dengan dokumen Renstra,	kinerja agar ditetapkan dengan baik. 4) Dokumen PK agar dimonitor pencapaiannya secara berkala, dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan serta target kinerja yang diperjanjikan agar digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.			

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
namun dokumen RKT belum sepenuhnya menetapkan target dengan baik serta indikator kinerja sasaran dan kegiatan belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. 6) Dokumen RKT telah digunakan sebagai acuan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK), telah menyajikan IKU serta telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran (RKA). 7) Dokumen PK telah ditetapkan, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan serta target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan satker.				

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
b. Pengukuran Kinerja 1) Terdapat Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran kinerja secara formal. 2) Pada kualitas pengukuran, IKU telah dapat diukur secara objektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur serta telah digunakan untuk mengukur kinerja dan realisasinya. 3) Pada implementasi pengukuran, IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, telah direvisi secara berkala, serta pengukuran kinerja telah digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.	b. Pengukuran Kinerja 1) Mempertahankan dan meningkatkan kualitas IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, dengan menyempurnakan indikator kinerja agar dapat digunakan untuk memperbaiki serta meningkatkan kinerja selanjutnya. 2) Mempertahankan dan menyempurnakan implementasi pengukuran agar dapat dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta dapat digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.	b. Pengukuran Kinerja IKU dijadikan dasar dalam perencanaan dan penyusunan anggaran	Triwulan/Semester	Ketua Pengadilan Tinggi

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
c. Pelaporan Kinerja 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah disusun dan telah disampaikan tepat waktu. 2) LKjIP telah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi pada <i>output/outcome</i> , telah menyajikan informasi mengenai kinerja yang diperjanjikan. 3) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja, belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. 4) LKjIP belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi	c. Pelaporan Kinerja 1) Menyempurnakan penyajian informasi kinerja dalam LKjIP dengan analisis yang mendalam, menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja sehingga informasi kinerja dalam LKjIP dapat diandalkan.	c. Pelaporan Kinerja Inventarisasi dan analisis data secara berkala	Triwulan/Semester	Ketua Pengadlan Tinggi

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, serta informasi dalam LKjIP belum sepenuhnya dapat diandalkan. 5) Informasi yang disajikan dalam LKjIP telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah digunakan untuk peningkatan dan penilaian kinerja satker.				
d. Evaluasi Internal 1) Terdapat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja, serta terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. 2) Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja dibawahnya telah dilakukan, serta hasil evaluasi telah disampaikan dan	d. Evaluasi Internal 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja agar dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta dilakukan supervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan secara reguler dan bertahap. 2) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja agar ditindaklanjuti	d. Evaluasi Internal Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja per triwulan	Triwulan/Semester	Ketua Pengadilan Tinggi

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 3) Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menggunakan pedoman/juklak evaluasi yang selaras dengan pedoman/juklak evaluasi Menpan dan RB, namun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi serta belum sepenuhnya disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan secara reguler dan bertahap. 4) Evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan manajemen kinerja yang dapat dilaksanakan. 5) Hasil evaluasi	untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, serta digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.			

HASIL EVALUASI SAKIP BAWAS	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, serta belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.				
e. Pencapaian Kinerja 1) Target <i>output/outcome</i> telah dapat dicapai, namun capaian kinerja <i>output/outcome</i> belum lebih baik dari tahun sebelumnya, serta informasi mengenai kinerja <i>output/outcome</i> belum sepenuhnya dapat diandalkan.	e. Pencapaian Kinerja 1) Agar meningkatkan capaian kinerja <i>output/outcome</i> sehingga capaian kinerja <i>output/outcome</i> lebih baik dari tahun sebelumnya dan memperbaiki informasi mengenai kinerja <i>output/outcome</i> sehingga dapat diandalkan.	e. Pencapaian Kinerja Melakukan pendataan dan inventaris capaian kinerja <i>output/outcome</i>	Triwulan/Semester	Ketua Pengadlan Tinggi

Palangkaraya, 01 Februari 2019
 KETUA PENGADILAN TINGGI/PALANGKA RAYA,



H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.
 NIP. 19590511 198403 1 004

Lampiran 8

SK Pembentukan Tim Penyusun
LKjIP PT Palangka raya



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 187 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, wajib merumuskan dan menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana huruf (a) maka dipandang perlu membentuk tim perumus dan penyusun dokumen LKjIP;
- c. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 Hal Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA.

Kesatu : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Kedua : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas menyusun dan menyajikan dokumen LKjIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 3 Desember 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,



Mochamad Hatta

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Nomor : 187 /KPT/OT.02.1/SK/XII/2019

Tanggal : 3 Desember 2019

No	OUTLINE	TIM	JABATAN
1	Bab I Pendahuluan		
	Pendahuluan	Penanggung Jawab : 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. 3. Richard Silalahi, S.H. 4. Hj. Aida Harum Mubarakah, S.H., M.H. 5. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 6. Isti Yani, S.Si. Kompilator : Apridius, S.E., M.Si.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Plt. Sekretaris Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran Pelaksana
2.	Bab II Perencanaan Kinerja		
	Rencana Strategis Perjanjian Kinerja	Penanggung Jawab : 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Endang Sri Widayanti, S.H., M.H. 3. Richard Silalahi, S.H. 4. Hj. Aida Harum Mubarakah, S.H., M.H. 5. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 6. Isti Yani, S.Si. Kompilator : Apridius, S.E., M.Si.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Plt. Sekretaris Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Kasubbag. Rencana Program dan Anggaran Pelaksana

3.	Bab III Akuntabilitas Kinerja		
A.	Capaian Kinerja Organisasi	Penanggung Jawab : 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. 3. Sucipto, S.H., M.H. 4. Pudji Tri Rahadi, S.H. 5. Houtman Lumban Tobing, S.H., M.H. 6. Porman Situmorang, S.H., M.H. 7. Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. 8. Harini, S.H., M.H. 9. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. 10. F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum. 11. Richard Silalahi, S.H. 12. Sulaiman, S.H., M.H. 13. John M. Abdurrahman, S.H. 14. Masni, S.H. 15. Harly Marlyn Simanjuntak, S.H. 16. I Wayan Wasta, S.H. Kompilator : 1. Mersia Sibarani, S.E. 2. Yudi Yusliannoor, S.H. 3. Evi Katsiani, S.E.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Panitera Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
B.	Realisasi Anggaran	Penanggung Jawab : 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Dwi Prapti Maryudiaty, S.H. 3. Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. 4. Nawaji, S.H. 5. Hj. Aida Harum MuPbarokah, S.H., M.H. 6. Monalisa Agustina Toewak, S.E. Kompilator : Junaldi Singarimbun, S.E.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Kabag. Umum dan Keuangan Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan Pelaksana

4.	Bab IV Penutup		
	Kesimpulan dan Saran	Penanggung Jawab : 1. Roki Panjaitan, S.H. 2. Setyaningsih Wijaya, S.H., M.H. 3. Sucipto, S.H., M.H. 4. Pudji Tri Rahadi, S.H. 5. Houtman Lumban Tobing, S.H., M.H. 6. Porman Situmorang, S.H., M.H. 7. Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. 8. Harini, S.H., M.H. 9. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. 10. F.X. Supriyadi, S.H., M.Hum. 11. Dwi Prapti Maryudiati, S.H. 12. Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. 13. Richard Silalahi, S.H. 14. Nawaji, S.H. 15. Sulaiman, S.H., M.H. 16. Hj. Aida Harum Mubarakah, S.H., M.H. 17. Faisal Sru Bramantyo, S.E. 18. John M. Abdurrahman, S.H. 19. Masni, S.H. 20. Harly Marlyn Simanjuntak, S.H. 21. I Wayan Wasta, S.H. 22. Monalisa Agustina Toewak, S.E. Kompilator : 1. Mersia Sibarani, S.E. 2. Junaldi Singarimbun, S.E. 3. Yudi Yusliannoor, S.H. 4. Evi Katsiani, S.E.	Wakil Ketua PT Palangka Raya Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Hakim Tinggi Panitera Pit. Sekretaris Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian Panitera Muda Khusus Tipikor Panitera Muda Perdata Panitera Muda Hukum Panitera Muda Pidana Kasubbag. Keuangan dan Pelaporan Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana

Tim Kompilator	1. Mersia Sibarani, S.E. 2. Junaldi Singarimbun, S.E. 3. Apridius, S.E., M.Si. 4. Yudi Yusliannoor, S.H. 5. Evi Katsiani, S.E. 6. Bangga Crysto Tarigan, A.Md. 7. Yuli Harianto	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Honorer
------------------------------	---	--



Ketua Majelis Pengabdian Masyarakat Universitas Palangka Raya,

Mochamad Hatta

Lampiran 9
Notulen Rapat Penyusun LKjIP
PT Palangka raya

**NOTULEN RAPAT
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2019**



**PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
2020**



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI



LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Palangka Raya, 30 Januari 2020

Diperiksa oleh:

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. 19590430 198512 1 001

Dibuat Oleh:

Notulen,

APRIDIUS, S.E.
NIP. 19880405 200912 1 002

Disetujui Oleh:

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

ROKI PANJAITAN, S.H.,
NIP. 19590430 198512 1 001



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI

HARI/TANGGAL RAPAT	KAMIS / 30 JANUARI 2020	CEKLIS LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	RUANG RAPAT ISEN MULANG, PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☐	DOKUMENTASI FOTO
MULAI WAKTU RAPAT	PUKUL 09.00 – 10.30 WIB	☐	UNDANGAN
POKOK BAHASAN RAPAT	RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☐	DAFTAR HADIR
PIMPINAN RAPAT	ROKI PANJAITAN, S.H., (WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA)	☐	
MODERATOR	-		
MC	-		
NOTULIS	APRIDIOUS, S.E.		

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dihadiri oleh Tim Penyusun LKjIP PT Palangka Raya, berjumlah 29 (dua puluh sembilan) orang. Selanjutnya rapat dibuka oleh pimpinan rapat.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dilanjutkan dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut:

1. Membacakan susunan Tim Penyusun LKjIP sesuai Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 187/KPT/OT.01.2/SK/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019.
2. Instansi memiliki kewajiban untuk melaporkan pencapaian kinerjanya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
3. Instansi menjelaskan capaian kinerja dibandingkan dengan target capaian kinerja yang telah ditetapkan.
4. Laporan tersebut dikirim paling lambat tanggal 28 Februari 2020.
5. Dokumen SAKIP yang harus disiapkan ada 11 dokumen, yaitu:
 - a. Reviu IKU;
 - b. IKU;



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI

- c. Reviu Renstra 2015-2019;
 - d. Renstra 2020-2024;
 - e. Revisi PKT 2019;
 - f. PKT 2020;
 - g. Revisi RKT 2019;
 - h. Revisi RKT 2020;
 - i. RKT 2021;
 - j. LKjIP 2019;
 - k. Rencana Aksi.
6. Penyusunan ikhtisar eksekutif belum bisa dibuat karena menunggu Bab III selesai dibuat.
 7. Pengumpulan data untuk pembuatan Bab III dikoordinir oleh Hatiwasbid masing-masing bersama Panmud untuk selanjutnya diserahkan kepada koordinator data untuk Bab III, Ibu Surya Yulie Hartanti, S.H., M.H. selambatnya tanggal 4 Febuari 2020. Selanjutnya data diserahkan kepada Panitera selambatnya tanggal 5 Februari 2020, untuk dianalisa dan dituangkan dalam Bab III LKjIP.
 8. Seluruh bab dalam LKjIP selesai dibuat dan diserahkan kepada tim kompilator selambatnya tanggal 17 Februari 2020.
 9. Selanjutnya tanggal 17 s.d. 19 Februari 2020 Tim kompilator menyusun LKjIP sampai menjadi sebuah laporan lengkap (buku) dan diserahkan ke KPT tanggal 20 Februari 2020 untuk finalisasi.
 10. Tahap finalisasi LKjIP diselesaikan sebelum batas akhir penyampaian laporan tanggal 28 Februari 2020.



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI

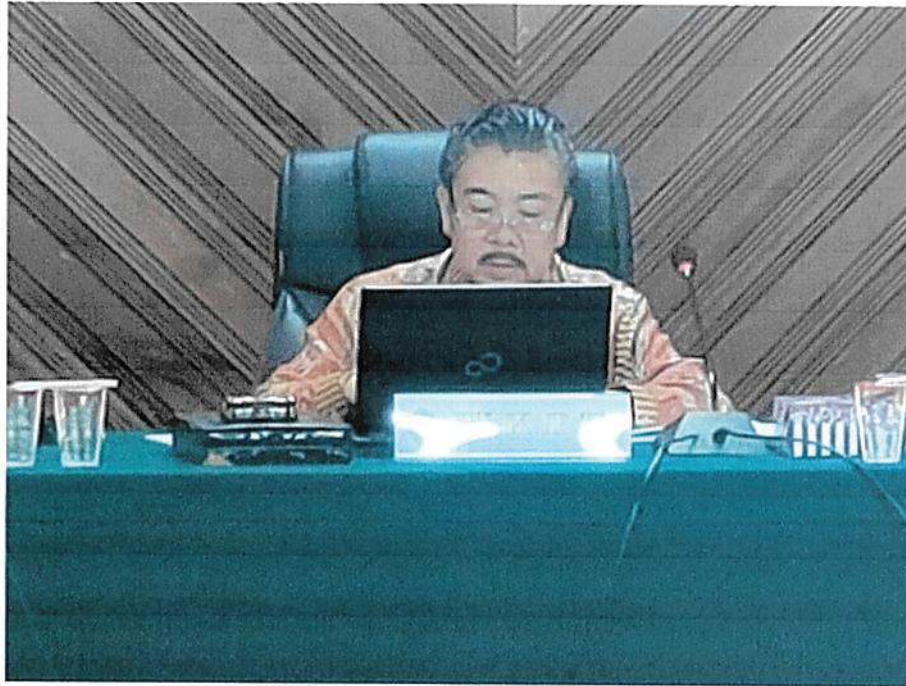


Foto 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selaku Ketua Tim, memimpin rapat.



Foto 2. Rapat diikuti oleh Tim Penyusun LKjIP



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangka Raya, 24 Januari 2020

Perihal : UNDANGAN

Yth. :
Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
di –
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat, Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Jl. RTA. Milono No. 9 Palangka Raya

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

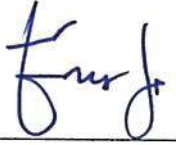
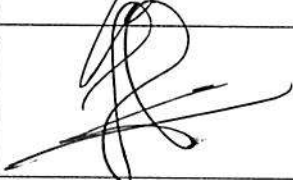
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

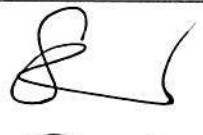
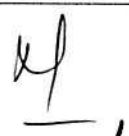


Roki Panjaitan

**RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

DAFTAR HADIR
Kamis, 30 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	TX MURRAYADI	HT	
2.	Faizal SRUB	Kabag P&K	
3.	Harim.	HT	
4.	Ish-tani	Kasub RPA	
5.	Winnu	HT	
6.	Setyungsih	HT	
7.	Susipda	HT	
8.	Nem Polom	HT	
9.	Kawaji	HT	
10.	I Wayan Wistha	pancas pdtan	
11.	Ihnu Wran A	pancas pdtan	

12.	Harly H. Simangunsil	PM. Hulur	
13.	Pulji Tri Reksa	HT.	
14.	Masri	Pan Mud. Perelata	
15.	Porman S	HT	
16.	Richard Silaldu	HT	
17.	Dwi Iraph	HT	
18.	Houtman C Tobing	HT	
19.	AIDA HARUM MUBARAKAH	ICABAG LEMBU & KEKAWAS AN	
20.	Surya Julia	HT	
21.	MERSIA SIBARANI	STAF KEPERAWATAN	
22.	Endang SW	HT	
23.	Wahyu DW	HT	
24.	Evi Kartstani	Staf Kepan. Perawatan	

25.	Yudi	STAF KOP PERDAS	
26.	BANGGA CHRYSO TARIGAN	STAFF KPTI	
27.	Amidius	STAF KPA	
28.	Sulaima	Pmibx	
29.	Roki Panjaitan	WKPT	
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			

38.			
39.			
40.			

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



[Handwritten signature]
 ROKI PANJAITAN, S.H.
 NIP. 19590430 198512 1 001

**NOTULEN RAPAT
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2019**



**PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
2020**



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com

RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2019



LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Palangka Raya, 20 Februari 2020

Diperiksa oleh:

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Dibuat Oleh:

Notulen,

APRIDIOUS, S.E.

NIP. 19880405 200912 1 002

Disetujui Oleh:

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

RAPAT PENYUSUNAN LKjIP TAHUN 2019

HARI/TANGGAL RAPAT	KAMIS / 20 FEBRUARI 2020	CEKLIS LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	RUANG RAPAT ISEN MULANG, PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☒	DOKUMENTASI FOTO
MULAI WAKTU RAPAT	PUKUL 09.00 – 12.00 WIB	☒	UNDANGAN
POKOK BAHASAN RAPAT	PEMBAHASAN BAB III DAN IV LKjIP TAHUN 2019 PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA	☒	DAFTAR HADIR
PIMPINAN RAPAT	ROKI PANJAITAN, S.H. (WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA)	☐	
MODERATOR	-		
MC	-		
NOTULIS	APRIDIOUS, S.E.		

BAHASAN MATERI RAPAT

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dihadiri oleh Tim Penyusun LKjIP PT Palangka Raya, berjumlah 16 (enam belas) orang.

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan dilanjutkan dengan pembahasan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembahasan Bab III LKjIP 2019, bahwa ada capaian lebih dari 100%. Hal itu disebabkan karena ada realisasi kinerja yang melebihi target yang sudah ditetapkan
2. Perubahan isi Bab III diselaraskan dengan dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
3. Menambahkan data tahun 2015 kedalam *time series* sehingga data yang disajikan mulai 2015 sampai 2019 (5 tahun) sesuai periode RPJMN lima tahun.
4. Ditargetkan untuk diselesaikan hari ini (Kamis, 20 Februari 2020).



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI FOTO



Foto 1. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, selaku Ketua Tim, memimpin rapat.



Foto 2. Rapat diikuti oleh Tim Penyusun LKjIP



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI FOTO



Foto 3. Rapat diikuti oleh Tim Penyusun LKjIP



Foto 4. Tim Bab III LKjIP membahas penyelarasan dengan PKT 2019



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id

Email : pt_kalteng@yahoo.com

DOKUMENTASI FOTO

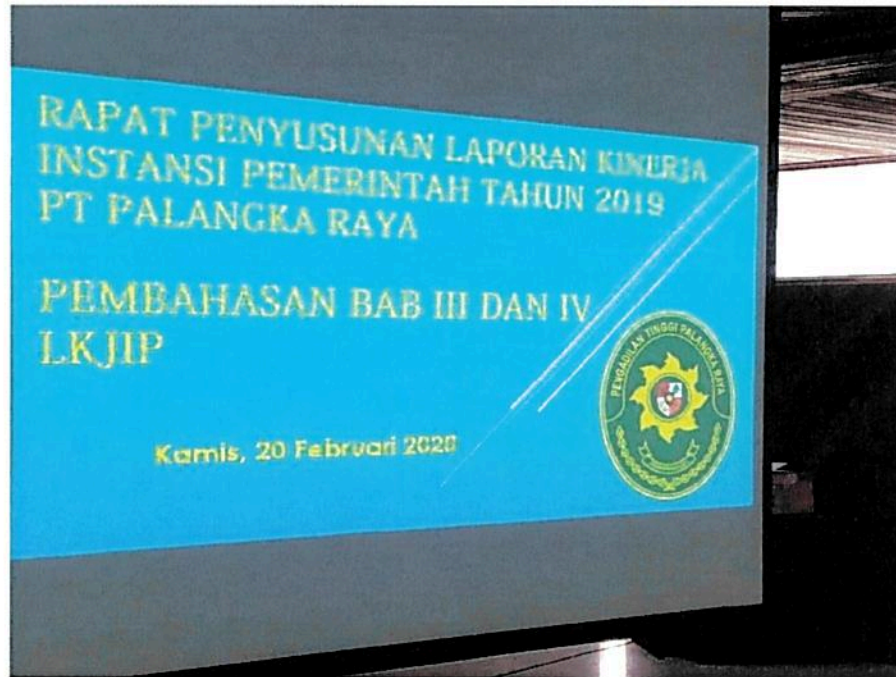


Foto 5. Agenda rapat membahas Bab III dan IV



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854

PALANGKA RAYA 73111

Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

Palangka Raya, 19 Februari 2020

Perihal : UNDANGAN

Yth. :

Tim Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
di –
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakannya rapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, diharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Aula Isen Mulang, Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Jl. RTA. Milono No. 9 Palangka Raya

Agenda rapat : Pembahasan Bab III dan IV LKjIP

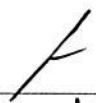
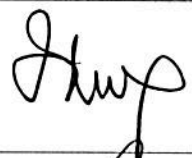
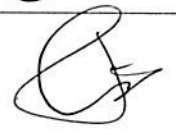
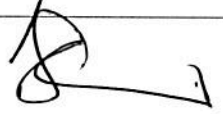
Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

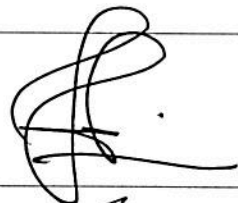
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,


Roki Panjaitan

**RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

DAFTAR HADIR
Kamis, 20 Februari 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Roki Pangaitan	WIKPT	
2.	FX SUPRIYADI	HT	
3.	Hootman L Tobing	HT	
4.	Porman Situmorang	HT	
5.	Supripto	HT	
6.	Zahyqir	HT	
7.	Surge Belle	HT	
8.	Dwi Phaph	HT	
9.	Pudji Tri Rahadi	HT	
10.	Harly M. Simangunsih	Prasid. Harben	
11.	AIDA HARUM M	KABAG Umum & KELA	

12.	John Murni A	Pan. Musl. TIPUKOR	
13.	I WAYAN WATTA	pan musl Pdtas	
14.	Masni	pan musl Pdtas	
15.	Isbi Fani	Kasub RPA	
16.	Eri Katsiani	Staf Pdtas	
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			

25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,



[Handwritten signature]

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001